

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.sos)**

OLEH:

SUHAILAH HAYATI

NIM: 13.15.4.049

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.sos)**

OLEH:

SUHAILAH HAYATI

NIM: 13.15.4.049

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

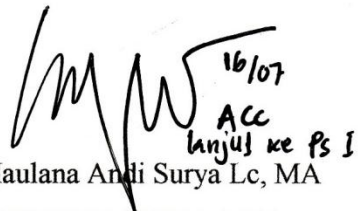
Pembimbing I



Dr. H. Muaz Tanjung, MA

NIP. 19661019 200501 1 003

Pembimbing II



H. Maulana Andi Surya Lc, MA

NIP.19750325 200801 1 011

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

Nomor : Istimewa

Medan, 01 Juli 2019

Lamp : Terlampir Medan, 01 Juli 2019

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU

An. Suhailah Hayati

Di-

Medan

Assalamua'alaikum Wr. Wb

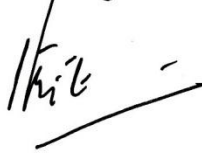
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Suhailah Hayati yang berjudul "Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai". Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara/i tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003

Pembimbing II



H. Maulana Andi Surya Lc, MA
NIP.19750325 200801 1 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telepon (061) 6615683-6622925 Faksimil (061) 6615683
www.fdk.uinsu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilita Di Kota Binjai, An. Suhailah Hayati** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah pada tanggal 12 Agustus 2019, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Panitia Ujian Munaqasah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan

Ketua

Dr. H. Muaz Tanjung, MA
NIP. 19661019 200501 1 003

Sekretaris

Dr. Salamuddin, MA
NIP. 19740719 200701 1 014

Anggota Penguji:

1. **Drs. H. Al Asy'ari, MM**
NIP. 19631004 199103 1 002
2. **Dr. Salamuddin, MA**
NIP. 19740719 200701 1 014
3. **Dr. H. Muaz Tanjung, MA**
NIP. 19661019 200501 1 003
4. **H. Maulana Andi Surya. Lc, MA**
NIP. 19750325 200801 1 011

1.....

2.....

3.....

4.....

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Dr. Soiman, MA
NissP. 19660507 199403 1 005

ABSTRAK

Nama : Suhailah Hayati

Judul : Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak memperoleh kedudukan, peran yang sama dan memiliki hak untuk kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya, keberadaan penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit, tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya bahkan kurang mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini, Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fasilitatif telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh Umat manusia. Shalawat dan salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga Sdan para sahabat, serta kepada umatnya yang selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman.

Dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan SKRIPSI ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan dihadapan para pembacayang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenaan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan proposal ini. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberi bantuan dan partisipasinya dalam usaha penyelesaian skripsi ini terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Soiman, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bapak Drs. Efi Brata Madya, M.Si selaku Wakil Dekan I, bapak Drs. Abdurrahman M.Pd selaku Wakil Dekan 2, dan bapak Muhammad Husni Ritonga, MA
3. Bapak Dr. H. Muaz Tanjug, MA. selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) sekaligus pembimbing 1 dan bapak Dr. Salamuddin, MA selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak H. Maulana Andi Surya. Lc, MA selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberikan kontribusi berupa nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan akademik serta seluruh pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan
6. Kepada Tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kota yang telah meluangkan dan memberikan jawabannya sehingga membantu terselesainya skripsi ini.

7. Yang tercinta dan tersayang kepada kedua orang tua ayahanda M. Mahdi MA dan ibunda Dra. Darmayanti yang telah mengasuh, mendidik dan membimbing penulis mulai dari kecil hingga sampai sekarang ini dengan penuh kasih sayang, *I love You*.
8. Kepada Adik-adikku tercinta Abdus Salam Al-Ghifari dan abang M. Gamal Abdul Nasser serta sepupu yang selalu memberi semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Yang terkasih Irwan Juha Lubis yang selalu memberi semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Yasa, Mita, Riri dan teman-teman sekelas PMI A Stambuk 2015 yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan balasan yang terbaik kepada semuanya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah, *Amin Ya Rabbal`Alamin*.

Penulis, 01 Juli 2019

Suhailah Hayati

13.15.4.049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Konsep Peran.....	9
1. Pengertian Peran.....	9
2. Macam-macam Peran.....	10
B. Dinas Sosial.....	13
1. Tugas Dinas Sosial.....	13
2. Fungsi Dinas Sosial.....	14
C. Pemberdayaan	15
1. Pengertian Pemberdayaan.....	15
2. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan.....	18

3. Tujuan Pemberdayaan.....	19
4. Pendekatan Pemberdayaan.....	20
5. Strategi Pemberdayaan.....	22
6. Metode-metode Pemberdayaan.....	25
C. Penyandang Disabilitas.....	29
1. Definisi Penyandang Cacat.....	29
2. Definisi Orang Berkebutuhan Khusus.....	30
3. Definisi Penyandang Ketunaan.....	31
4. Definisi Penyandang Disabilitas	32
D. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.....	34
E. Kajian Terdahulu.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Dinas Sosial Kecamatan Binjai Kota Kabupaten Kota Madya.....	44
B. Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.....	55
C. Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang	

Disabilitas di Kota Binjai.....57

D. Faktor Penghambat Dinas Sosial dalam Memberdayakan

Penyandang Disabilitas.....61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....63

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, dimana hampir di setiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan.

Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya penyandang disabilitas yang dalam kehidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya dapat berkehidupan normal. Maka dari itu perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosial.

Binjai merupakan kota dengan jumlah penduduk 267.901 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.961,86 jiwa dari km² pada april 2016. Tenaga kerja produktif sekitar 160.000 jiwa. Banyak juga penduduk Binjai yang bekerja di Medan karena transportasi dan jarak yang relatif dekat.¹ Dari 267.901 jiwa jumlah penduduk di Kota Binjai ada sebanyak 290 orang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2). Rinciannya, tuna daksa 115 orang, tuna netra 29 orang, tuna rungu/wicara 33 orang, tuna grahita 86 orang dan disabilitas lainnya 27 orang.²

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Hal ini dipertegas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

¹<http://www.binjainkota.go.id>, diaksespadahariRabu, tanggal 20-03-2019, pukul 17:33 WIB

²<http://medanmerdeka.com/pemilu/290-penyandang-disabilitas>, diaksespadahariRabu, 20-03-2019, pukul 17:33 WIB

Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat”.

Masyarakat berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang disabilitas. Sehingga bagi para penyedia lapangan pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas sama halnya dengan mendorong perusahaan dalam jurang kebangkrutan karena harus rela menyediakan beberapa alat-alat bantu bagi kemudahan para penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitasnya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas “pelabelan” sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi jasmani yang disandangnya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dihadapinya.

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.³ Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota Binjai, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang

³<http://info.metrokota.go.id>, diakses pada akses pada hari Rabu, 20-03-2019, pukul 17:33 WIB

dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas merupakan suatu upaya untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraannya. Memberdayakan penyandang disabilitas dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau proses memampukan dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita dalam Anwar, 2007: 1).

Upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai selaku instansi yang memang menangani masalah penyandang disabilitas berupa kegiatan pelatihan keterampilan. Terkait dengan uraian tersebut, kegiatan pelatihan yang diberikan seharusnya tidak hanya diberikan setahun sekali, dan bentuk pelatihan yang diberikan juga harus diperluas tidak hanya dengan pelatihan keterampilan namun dapat berupa kegiatan pemberdayaan yang memberikan peluang atau akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Menurut hasil pra-riset peneliti menemukan fakta bahwa pada usia diatas 18 tahun, ditemukan penyandang disabilitas yang mengemis dijalanan untuk mengharapkan sejumlah uang dari belas kasihan. Selain itu juga, peneliti menemukan bahwa penyandang disabilitas pada usia diatas 18 tahun yang mulai memasuki tahap produktif hanya berada di rumah, sehingga hanya menjadi beban tanggungan bagi

keluarga. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa program Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Binjai ?
3. Apakah faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai?

C. Batasan Istilah

1. Peran berarti laku atau bertindak. Secara etimologi peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.⁴ Sedangkan menurut Friedman, peran adalah serangkaian

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

2. Dinas sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan. Pelaksanaan diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵
3. Pemberdayaan berakar dari kata daya, bermakna: (1)Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2)Kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); (3) muslihat, empat, akal, ikhtiar, upaya. Pemberdayaan diartikan proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁶
4. Istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang disabilitas” maka berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat.

Dari batasan istilah di atas dapat dipahami dari judul skripsi yang diteliti oleh penulis adalah Peran merupakan sesuatu yang diharapkan kedepannya dapat memberi

⁵<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10601/dinas-sosial.html>, diakses tanggal 19-10-2018/pukul 22.30

⁶Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint, 2006), hlm, 127.

⁷Saharuddin Daming, “Pelebagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat” makalah Semiloka, (tidak diterbitkan, 2009)

pengaruh pada seluruh masyarakat atau lingkungan yang dilakukan oleh seseorang karena status atau kedudukan yang dimilikinya. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Binjai adalah tentang masih terdapatnya pengabaian hak penyandang disabilitas, dalam artian penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk memperoleh aksesibilitas, pekerjaan, kehidupan yang layak dan lain-lain.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai
2. Mengetahui bentuk pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Binjai
3. Mengetahui faktor penghambat dinas sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai

E. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pembaca dan instansi terkait dalam memahami dan menangani peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat
- 2) Melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan cara berfikir penulis mengenai peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Dakwah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
- 3) Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian program sarjana S1

F. Sistematika Pembahasan

BAB I berisikan tentang bagian Pendahuluan. Bagian ini dipaparkan Latar Belakang Masalah yang menggambarkan sekilas tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat setelah Latar Belakang Masalah selanjutnya dijealskan Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II mengemukakan mengenai tentang teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan. Bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pengertian dan tujuan, serta proses dari pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga melalui usaha pengupasan kerang serta kajian terdahulu.

BAB III meliputi Metodologi Penelitian, yang meliputi Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. *Bab* ini juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai apa saja Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

BAB IV pada bab ini akan di paparkan berupa hasil temuan penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian yang ada di dalam rumusan masalah dalam program dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan faktor penghambatnya yang terjadi.

BAB V yang berisikan kesimpulan akhir dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Sedangkan definisi lain, peran adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi atau individu yang penting bagi struktur sosial.⁹ Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.¹⁰ Pada definisi lain, peran diartikan sebagai sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian yang diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial, misalnya ibu, manajer, guru dan lainnya.¹¹

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran

⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm:667

⁹ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1997), hlm: 147

¹⁰ Carapedia, Pengertian dan Definisi Peran, <http://caeapedia.com/pengertian> definisi peraninfo2184html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 20.57 WIB

¹¹ Fahir, Teori Peran dan Definisi Peran menurut Ahli, <http://fahri-blus.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut> html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 21.17

tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.³

2. Macam-macam Peran

Seorang pengembang masyarakat mempunyai tugas utama, yaitu mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisir dan menentukan secara mandiri terhadap upaya-upaya yang diperlukan dalam kehidupan yang dijalaninya. Seorang pengembang masyarakat memiliki beberapa peran yang harus dilakukan dalam melakukan pengembangan terhadap suatu masyarakat, beberapa peran tersebut yaitu:

a) Mengorganisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan.¹²

b) Fasilitator

Fasilitator yaitu peran-peran yang dijalankan seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi, *pertama* membangun kesepakatan yakni membuat kesepakatan secara

¹²Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 576.

bersama-sama dengan melalui forum pertemuan, dimana pada kesepakatan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak yang terlibat.¹³ *Kedua*, menurut Persons Jorgensesns dan Hernandez yang dikutip oleh Edi Soeharto mengungkapkan bahwa salah satu peran dalam fasilitator yaitu dorongan melaksanakan tugas yang sudah terjadi tanggung jawabnya. Dimana dorongan tersebut harus dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan dan selalu mempunyai semangat dalam menyelesaikan kegiatan yang berlangsung.¹⁴ *Ketiga*, mengaktifkan masyarakat, dimana menurut Aziz Muslim, bahwa mengaktifkan masyarakat merupakan salah satu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

c) Pendidikan

Pendidikan yaitu peran-peran kependidikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan dan cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik.¹⁶

d) Keterampilan Teknik

Keterampilan Teknik yaitu pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan

¹³Aziz Muslim, *Metodologi Pengembang Masyarakat*, (Yogyakarta, Penerbit TERAS 2009), hlm. 72

¹⁴Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hlm. 98

¹⁵Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru: 2012), hlm. 248

¹⁶*Ibid*, hlm. 250

tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.¹⁷

e) Perwakilan

Perwakilan yaitu peran yang dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam interaksinya dengan lembaga luar atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dimana setelah mendapatkan hasil dari interaksi yang dilaksanakan, maka seorang pengembang masyarakat harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Peran perwakilan ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, sharing pengalaman dan pengetahuan serta jadi juru bicara masyarakat.

B. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah sebagaimana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan. Pelaksanaan diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, di Bab III, Tugas dan Fungsi Dinas yaitu:

1. Tugas Dinas Sosial

¹⁷Aziz Muslim, *Metodologi Pengembang Masyarakat*, (Yogyakarta, Penerbit TERAS 2009), hlm. 73

¹⁸<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10601/dinas-sosial.html>, diakses tanggal 19-10-2018/pukul 22.30

Tugas Dinas: mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonstrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Fungsi Dinas Sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

- Penyusunan program dan pengenalan di bidang sosial;
- Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
- Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
- Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
- Pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁹

¹⁹<http://dinsos.jogjaprovo.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 20-10-2018, pukul 23.00 wib

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan)²⁰.

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi'il (kata kerja) makna. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.²¹ Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

²⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2005), hlm. 57

²¹Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 14

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²²

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- A'raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha.

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”(QS. Al-A'raf (7: 10)

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat didalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang

²²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana &Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 24.

bersyukur.²³ Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menurut Chambers yang di kutip dari buku Zubaedi, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Menurut Ife pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.²⁴ Masih dalam buku tersebut, Parson mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan

²³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan ke-2*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), hlm. 340

²⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm.57

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut swift dan levin dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Berdasarkan beragam defenisi pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁵ Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka.

2. Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui terlebih dahulu konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Ketidakberdayaan disebabkan faktor seperti jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial

²⁵*Ibid.*, hlm.60

dan ketiadaan akses terhadap pelatihan-pelatihan. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang disabilitas, gay dan lesbian, serta masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi/keluarga.²⁶

Penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok lemah khusus, mereka sering kali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang hanya membebani orang lain karena keterbatasan yang dimilikinya. Dalam upaya penanganannya pun berbeda, mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan dengan masyarakat normal lainnya. Sementara itu, ketidakberdayaan mereka merupakan juga akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).²⁷

²⁶ Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung:PT. Reflika Aditama), hlm: 60-61

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : LP FEUI,2002), hlm. 162

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karenanya pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.²⁸

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*Empowerment*) pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.²⁹

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

²⁸*Ibid.*, hlm.60

²⁹*Ibid.*, hlm. 60

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak.

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.³⁰

³⁰Soeharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung:PT. Reflika Aditama), hlm: 67

5. Strategi Pemberdayaan

Menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.³¹

Dalam konteks pekerja sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing, atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

³¹*Ibid.*, hlm. 66

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih mereka serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.³²

Dengan Merujuk pada tujuan pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, dan strategi pemberdayaan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang mengalami kerentanan sosial (seperti: masalah kemiskinan, penyandang cacat, manula, perbedaan etnis, dan ketidakadilan gender). Upaya pemberdayaan tersebut ditujukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012:27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai:

“Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya agar dapat

³²*Ibid*, hlm. 66-67

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lainnya”³³.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih sejahtera. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Ambar Teguh (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2001:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan, dan proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny.S.Prijiono (1996:97) adalah pembangunan

³³Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:2014), hlm. 89

manusia seutuhnya masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang sektor kehidupannya.

Disamping itu, juga mengandung arti melindungi dan membeda dengan berpihak pada yang lemah, menurut Sudjana (2001:256) pentingnya pembangunanan masyarakat yang menitik beratkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan perananan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.³⁴

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam pemberdayaan yang bisa mengembangkan masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

6. Metode- Metode Pemberdayaan

a. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Menurut Chamber metode RRA membawa orang luar untuk belajar dengan biaya yang sangat efektif. Metode ini menggali sebanyak mungkin informasi tentang kondisi desa yang dilakukan oleh orang luar dan sangat sedikit melibatkan

³⁴Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:2013), Hlm:90

masyarakat setempat, teknik penilaian tentang desa. Kekurangan dari metode penilaian ini adalah walaupun mereka telah melakukan praktek partisipatif tetapi hanya dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan bertanya langsung kepada informan yaitu warga masyarakat itu sendiri.

Untuk melakukan teknik RRA perlu diperhatikan beberapa prinsip:

- 1) Efektifitas dan efisiensi, Kaitannya dengan biaya, waktu serta informasi yang diperoleh.
- 2) Belajar dari masyarakat
- 3) Melibatkan tim lintas ilmu untuk bertanya dalam beragam pandangan
- 4) Belajar cepat melalui eksplorasi, *cross-check* dan jangan terpaku pada materi yang telah disiapkan.

b. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*)

Metode PRA ini merupakan pengembangan dari metode RRA dimana metode RRA penekanannya adalah pada kecepatan (*rapid*) dan penggalan informasi oleh orang luar, sedangkan metode PRA menurut Chambers penekanannya pada partisipasi dan pemberdayaan. Prinsip PRA adalah belajar dari masyarakat dan orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai perilaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas, informal, menghargai perbedaan dan triangulasi.³⁵

Metode dan teknik PRA (*Participatory Rapid Appraisal*):

³⁵Brita Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 67-69

1) FGD (*Fokus Group Discussion*)

Esensi istilah FGD dalam masyarakat adalah rembug warga yakni tradisi gorong-royong yang sudah lama mengakar pada masyarakat. FGD merupakan teknik mengumpulkan data untuk memperoleh data dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Proses FGD melibatkan partisipan-partisipan, dimana mereka melakukan pertukaran pesan secara ideologis dalam kerangka pemahaman bersama atas situasi sosial.

Peran fasilitator sangat penting untuk menciptakan situasi yang menyenangkan bagi para partisipan dalam memecahkan masalah sehingga semua unsur masyarakat merasakan sumbangsih sarannya atas permasalahan yang sedang terjadi dilingkungannya.

1. PLA (*Participatory Learning and Action*) Proses Belajar dan Mempraktekkan secara Partisipatif

PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui ceramah, curah pendapat dan diskusi) tentang suatu topik seperti: pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat yang segera setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut dengan prinsip-prinsip:

- a. Merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan *Stakeholder* secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama
- b. *Multi Perspective*, mencerminkan keragaman interpretasi dari para pihak
- c. Spesifik lokasi sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat

- d. Difasilitasi oleh ahli dan stakeholder yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambilan keputusan, serta meneruskannya kepada pengambilan keputusan
- e. Pemimpin perubahan keputusan yang diambil melalui PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

2. Pendidikan *Andragogy*

Sering disebut dengan *adult education*, konsep ini mempraktekkan *consciousness* (menumbuhkan kesadaran). Masyarakat diajak untuk melihat kepada kenyataan dan keberadaan dirinya. Warga diajak untuk menyadari kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Terlalu banyak kekurangan melibatkan ketertindasan dan terlalu banyak kelebihan mengakibatkan kemalasan.³⁶

3. Bidang Keilmuan dan Penelitian

Diupayakan ada kritik sehingga mengarah kepada sifat partisipatif. Maksud bidang diatas adalah masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai obyek untuk tujuan menggali informasi dan data primer.

RRA memberikan sumbangan yang besar kepada PRA. Penekanan PRA adalah partisipasi dan pemberdayaan sehingga pelibatan masyarakat pedesaan dalam proses pengembangan program lebih intensif dan partisipatif.

4. Pelatihan Partisipatif

³⁶*Ibid, ... hlm. 71*

Ciri utama pelatihan ini adalah:

- a. Hubungan instruktur atau fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi horizontal
- b. Lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Bukan seberapa banyak yang terjadi alih pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagai pengalaman antara sesama peserta dan antara fasilitator dengan pesertanya
- c. Substansi materi pelatihan mengacu pada kebutuhan peserta, sebelum pelatihan dilaksanakan diawali dengan kontrak belajar.³⁷

C. Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang cacat

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang bai atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna.³⁸ Dari beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti

³⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51408/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Diakses pada 27 Februari 2019, pukul 09:34 Wib

³⁸Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:1990), Hlm:143

ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang cacat” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya³⁹.

2. Definisi Orang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Istilah “orang berkebutuhan khusus” (person with special needs) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus⁴⁰. Bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung.

Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Penyandang ini dalam usia sekolah disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik.

³⁹Biro Hukum Depsos RI, Undang-undang RI NO.4 Tahun 1997

⁴⁰*Dokumen Salamanca di Spanyol* tahun 1994 diselenggarakan di Unesco

Didalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan anak dengan gangguan kesehatan⁴¹.

3. Definisi Penyandang Ketunaan

Secara kebahasaan, tuna adalah kata sifat (*adjective*) dan kata bendanya adalah ketunaan, yang secara harfiah berarti kerugian atau kerusakan. Pararel dengan kata “tuna” yang digunakan untuk memperhalus kata “cacat”, maka kata “ketunaan” dapat pula digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan”. Oleh karena itu, istilah “penyandang ketunaan” cukup realistis. Karena tetap menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (kerusakan, kekurangan, dan kerugian sebagaimana arti hakikat harfiah kata tuna itu), tetapi tidak mengandung unsur merendahkan martabat berkat eufisme yang sudah melekat pada kata tersebut. Lebih jauh, istilah “tuna” juga sudah dikenal dan diterima secara luas, baik oleh penyandanginya maupun oleh masyarakat pada umumnya.

Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanginya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila, dan tunalaras. Tetapi, kata tuna tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang

⁴¹“Wikipedia Kamus Ensiklopedia”, diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/anak_berkebutuhan_khusus tanggal 06 Februari 2019.

rusak, tidak seperti kat cacat yang dapat digunakan untuk mengatakan. Misalnya, “sepatu ini cacat”.

4. Definisi Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”⁴². Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”. Dengan demikian, penulis ini menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai terminologi untuk merujuk kepada mereka yang sebelumnya disebut “penyandang cacat”.

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya⁴³. Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan diatas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseran dari paradigma lama ke

⁴²Saharuddin Daming, “Pelebagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat” makalah Semiloka, (tidak diterbitkan, 2009)

⁴³Kemensekneg RI, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)* Pasal1, hlm:3

paradigma baru, hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas , karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi , cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika diklasifikasikan, pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Istilah sebutan yang digunakan	Penyandang cacat	Difabel, Penyandang Ketunaan, Anak Berkebutuhan Khusus, Penyandang Disabilitas.
Model pendekatan	<i>Medical model,</i> <i>Traditional model,</i> <i>Indivudal model.</i>	<i>Social model</i>
Sifat pendekatan	<i>Charity</i> (belas kasihan)	Hak Asasi (<i>Human Rights-Approach</i>).

Istilah sebutan model pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap disabilitas seperti terlihat pada tabel diatas, telah menggambarkan pergeseran posisi dan perkembangan peran penyandang disabilitas. Menurut Brown S pada paradigma lama

penyandang disabilitas lama dilihat sebagai obyek, selalau diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan, dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru penyandang disabilitas baru dilihat dari sebagai pemakai pelanggan/dan rekan terberdayakan (*empowered peer*) menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan⁴⁴.

a. Jenis-jenis Karakteristik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis yaitu, pertama, kelompok kelainan secara fisik. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik terdiri dari tunagrahita, autis dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Karena luasnya spektrum penyandang disabilitas penulis membatasi penelitian ini dengan jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas tunanetra, tunarungu dan tunadaksa⁴⁵

D. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan kedepannya dapat memberi pengaruh pada seluruh masyarakat atau lingkungan yang dilakukan oleh seseorang karena status atau kedudukan yang dimilikinya. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Binjai adalah tentang masih terdapatnya pengabaian hak penyandang disabilitas, dalam artian penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk memperoleh aksesibilitas, pekerjaan, kehidupan yang

⁴⁴Brown S, "Methodological Paradigms that Shape Disability Research" dalam Alberch, G. Burry, M dan Seelman, *Handbook of Disability Studies*, (London:Sage), dalam Ro'fah dkk, *Membangun KampusInklusif*, (Yogyakarta:PLSD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm:15

⁴⁵T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Jakarta:Refika Aditama,2006),hlm:65-66

layak dan lain-lain. Hak penyandang disabilitas masih belum secara khusus diperhatikan, dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih minimnya sarana pelayanan sosial, kesehatan, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan aksitektural yang membuat kaum difabel kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh Dinas Sosial guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas sehingga mereka tidak lagi hanya bergantung pada orang lain. Dinas Sosial dalam menjalankan suatu peran dibutuhkan suatu tanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pembinaan dibidang sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

E. Kajian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada penelitian pertama dikembangkan oleh Gusti Indah Pratiwi, yang berjudul “*Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru.*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan uji validitas dan realibitas dalam bentuk kuisisioner untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini juga berfokus pada peran

pemerintah dalam perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas yang mencakup tentang kepedulian yang dilakukan melalui organisasi (PKPL)⁴⁶.

Sementara itu penelitian yang kedua Penelitian Darman Ardiansyah, yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terbukti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Kepulauan menangani masalah penyandang cacat supaya mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka. Sesuai dengan visi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat maka Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau menjalankan program-program seperti kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), peningkatan kemampuanwirausaha penyandang cacat tubuh dan rungu wicara di masyarakat dan penyaluran asistensi sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).⁴⁷

Dalam penelitian dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dijelaskan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang di lakukan sekarang. Adapun

⁴⁶Gusti Indah Pratiwi. “Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru”. *Jurnal* (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, 2016).

⁴⁷Darman Ardiansyah, “Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau”, *Skripsi* (Kepulauan Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015).

perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, lokasi penelitian, penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat yang menyandang disabilitas agar meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pemahaman dan referensi skripsi di atas maka penelitian skripsi ini berfokus pada peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan yang bertepatan di Binjai Kota. Alasan Penelitian memiliki lokasi ini adalah karena atas pertimbangan bahwa Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masaah sosial mempunyai tugas dan wewenang dalam proses pemberdayaan khususnya penyandang disabilitas sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Jenis penelitian ini yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses, dan juga penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dari kebijakan yang dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya

melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik observasi bersifat partisipan, yaitu pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observer (peneliti) dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Teknik penelitian yang peneliti lakukan ini adalah langsung terjun kelokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Binjai agar si peneliti dapat mengetahui aktifitas dan keseharian dari masyarakat sekitar yang akan diteliti.

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengamat, yaitu peran peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Yaitu sebagai anggota pura-pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Peran demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Data yang diperoleh dari hasil observasi adalah gambaran tentang kondisi masyarakat Kota Binjai.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara/interview adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan petunjuk umum wawancara, petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi

wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seutuhnya tercakup.⁴⁸

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsikan atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁹

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.⁵⁰

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 136.

⁴⁹Moloeng, Lexy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung (PT. Remaja Rosdakarya 2002), hlm. 211.

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Cet, XIV; Jakarta : CV. Alfabeta, 2006), hlm. 16.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di peroleh melalui pengamatan atau wawancara secara langsung terhadap informan. Pengambilan data primer dilakukan dengan meneliti secara langsung ketika dinas sosial melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas mereka. Dalam sumber data primer terdiri dari:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a. Kepala DINSOS Kota Binjai | : Drs. H. T. Syarifuddin, MPd |
| b. Sekretaris | : Triono Julimawardi, S.Sos |
| c. Kasubag Program | : Rosnova Meutia, SE |
| d. Kabid Rehabilitas Sosial | : Bambang Lestrika B. ST, MAP |
| e. Staf Dinas Sosial | : Gunawan |
| f. Anak Penyandang Disabilitas | : Ari Permana |

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, dokumentasi dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah diperoleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah ditemukan, diuji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama diakhir penelitian dan melakukan wawancara kepada pengurus panti yang lain.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan tehnik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Pada tahap ini merupakan tahapan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

observasi, wawancara dan data pendukung lainnya untuk lebih memahami peneliti atas fenomena yang diteliti.⁵¹

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 177.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil/Sejarah Dinas Sosial Kota Binjai

1. Latar Belakang Dinas Sosial Kota Binjai

Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Binjai. Dinas Kota Binjai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai dengan tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Kantor Dinas Sosial sberalamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 83, Limau Mungkur, Binjai Barat, Sumatera Utara 20717.

Perlu dikemukakan bahwa bidang tugas Departemen Sosial pada saat terbit PP. No. 5 tahun 1958 adalah sebagai berikut: – Research – Rehabilitasi Penyandang Cacat – Urusan Korban Perang – Urusan Perumahan – Urusan Transmigrasi – Urusan Bimbingan dan Perbaikan Sosial Dengan diterbitkannya PP Nomor : 5 Tahun 1958, urusan yang diserahkan adalah meliputi urusan bimbingan dan perbaikan sosial. Penyerahan tugas tersebut diserahkan berdasarkan “Azas Desentralisasi atau Azas Tugas Pembantuan”. Tugas yang diserahkan atas azas desentralisasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya (tugas otonom) adalah:

- a. Penyelenggaraan pusat-pusat penampungan bagi anak-anak terlantar (untuk observasi dan seleksi).
- b. Penyelenggaraan panti asuhan bagi bayi terlantar.
- c. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat pertama bagi anak yatim piatu dan anak terlantar.
- d. Penyelenggaraan panti asuhan tingkat lanjutan bagi anak yatim piatu yang terlantar.
- e. Penyelenggaraan pusat penampungan bagi orang dewasa terlantar dan gelandangan (untuk observasi dan seleksi).
- f. Penyelenggaraan panti karya tingkat pertama.
- g. Penyelenggaraan panti karya tingkat lanjutan.
- h. Penyelenggaraan rumah perawatan bagi orang jompo.
- i. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- j. Penyelenggaraan usaha sosial ke arah pemberantasan kemiskinan.
- k. Pengawasan/bimbingan serta pemberian bantuan/subsidi kepada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.

Tugas yang diserahkan atas Azas Bantuan dalam bidang bimbingan dan perbaikan sosial tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan sosial.

- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial tahap pemberian pengertian, kesadaran dan tuntutan teknis pengembangan swadaya masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan tenaga sosial, rehabilitasi berkas hukuman.
- d. Pengawasan/bimbingan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha tersebut di atas.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Binjai

Visi merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengembalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakkan organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong dan untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Adapun visi Dinas Sosial Kota Binjai adalah: **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Binjai Yang Nyaman Dan Sejahtera”**.

Dari pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi nyaman dan sejahtera pada tahun 2021.⁵²

⁵² Pemerintah Dinas Sosial Kota Binjai, Program Dinas Sosial, (Binjai:2016), hlm:8-10

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Drs. H. T. Syarifuddin, MPd selaku kepala Dinas Sosial Kota Binjai pada hari Senin 08 Juli 2019 Jam 09.30. Beliau mengatakan adapun tujuan yang ingin dicapai kantor Dinas Sosial Kota Bnjai ini adalah:

- a. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- b. Mengembangkan perlindungan dan Jaminan sosial bagi PMKS.
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial untuk menjadi berkelanjutan peran serta dalam
- e. penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁵³

Selain itu, tujuan Dinas Sosial Kota Binjai dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai sebagai berikut:

- a. Membanntu penyandang disabilitas dalam kreatifitasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk dapat hidup bersama manusia normal lainnya di masyarakat.

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Senin 08 Juli 2019 Jam 09.30

- b. Memfasilitas keinginan, minat dan bakat yang terpendam bagi penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya untuk dapat berkiprah dan bersaing dengan manusia normal lainnya, serta turut membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, merupakan hak setiap warga negara.
- c. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam membantu masyarakat disabilitas agar dapat sama-sama membangun jiwa dan raga penyandang disabilitas, karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib mendapatkan pendidikan yang layak lahir dan batin untuk hidup sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Triono Julimawardi, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai pada hari Selasa 09 Juli 2019. Beliau mengatakan bahwa Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai mempunyai tugas:

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan Fakir Miskin Perkotaan
- b. Penetapan kreteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu
- c. Penetapan standart Rehabilitasi Sosial
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungj awab sosial
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerianSosial
- f. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial baik lintas program maupun lintas sektoral
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.⁵⁴

2. Struktur Organisasi

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Bambang Lestrika B. ST, MAP selaku Kabid Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Binjai pada hari Rabu 10 Juli 2019 Jam 09.30 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 34 tahun 2016 sebagai berikut:

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak Julimawardi,Triono selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Binjai, Selasa 09 Juli 2019

Kepala Dinas : Drs. H. T. Syarifuddin, M.Pd

Sekretaris : Triono Julimawardi, S.Sos

Kasubag Umum & Kepegawaian : Oskar. S.STP

Kasubag Keuangan : Leli Ginting, SMHk

Kasubag Program : Rosnova Meutia, SE

Kabid Rehabilitasi Sosial : Bambang Lestrika B. ST, MAP

Kabid Pemberdayaan & JAMSOS : M. Ikhsan Siregar, SH

Kabid Kelembagaan Sosial : Drs. Simon Sitepu

Kabid Potensi Sosial Kepahlawanan : Suzannah Budiati

Kasi Kepahlawanan & Kejuangan : M. Habibullah Pohan

Kasi Disabilitas & Narkoba : Drs. Lukman

Kasi Karang Taruna : Ema Yohani

Kasi Advokasi & Layanan PMKS : Yuslan, SE

Kasi Jaminan Sosial : Dra. Suriati Hutajulu

Kasi WKSBM & Komunitas Sosial : T. Muli Sembiring, S.Sos

Kasi SDM PSM & Kemitraan Sosial : Setiawan Solat, S.Sos

Kasi Pelayanan LANSIA & ANAK : Ida Sufianty, S.Sos

Kasi Sumbangan & Perlindungan Sosial: Hendra Fereddy S, SE

Kasi Lembaga KESOSMAS : Yusuf, SH

Kasi Penyuluhan Sosial : Sri Arfiani

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan, urusan umum dan kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan
- 3) Penatausahaan keuangan.
- 4) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan, penatausahaan keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) rencana strategis (RESENTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya.

- 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas.
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan pembendaharaan.
- 6) Melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya.
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut:

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
- 2) Menyelenggarakan penatausahaan urusan rumah tangga dinas.
- 3) Melaksanakan urusan surat-menyurat.
- 4) Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas.
- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
- 7) Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

d. Bidang Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial

Bidang rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami

masalah sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- 2) Melaksanakan program rehabilitasi anak dan pemberdayaan sosial.
- 3) Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia.
- 4) Pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial.
- 5) Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan korban perdagangan orang (KPO).
- 6) Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
- 7) Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
- 8) Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.

e. Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KTO).

Memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang yang meliputi upaya preventif, rehabilitatif dan represif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KTO memiliki tugas:

- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KTO.
- 2) Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat bantuan sosial dan vokasional.
- 3) Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial.
- 4) Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan.
- 5) Melakukan respon kasus terhadap korban KTO/KTK
- 6) Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan.⁵⁵

3. Sumber Daya Dinas Sosial

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Sosial telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial sampai saat ini berjumlah 39 orang terdiri dari:

⁵⁵Hasil wawancara dengan bapak Bambang Selaku Kabid Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Kota Binjai, Rabu 10 Juli 2019 Jam 09.30

JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL

Tabel 1.1

NO	Pegawai	Jumlah/ orang	Ket.
1	Berdasarkan eselon setatus pegawai Jumlah = 39 orang		
2	Pejabat eselon II Pejabat eselon III Pejabat eselon IV Staf Tenaga Kerja Pramubakti	1 5 15 18 5	
3	Berdasarkan status pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • S2 • S1 • D1 • SMA • SD 	2 20 1 14 2	
4	Berdasarkan golongan <ul style="list-style-type: none"> • IV/b • IV/b • III/d • III/c • III/b • III/a • II/d • II/c • II/b • II/a • I/d • I/c • I/b • I/a 	2 4 14 7 3 2 1 2 2 2 - - - 2 - -	

Sumber: Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2016

b) Sarana Prasarana

SARANA PRASARANA DINAS SOSIAL

Tabel 1.2

NO	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Gedung Perkantoran	1	
	Rumah Dinas	1	
2	Kendaraan Roda 4	1	
	Kendaraan Roda 2	2	
3	Perlengkapan Kerja		
	• Komputer PC	4	
	• Notebook	6	
	• Printer	6	
	• Meja Tulis	25	
	• Dll, sesuai data aset	-	

Sumber: Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2016

B. Program Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai.

Penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu melakukan kegiatan dan hanya menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan keterbatasan gerak mereka. Hal ini menimbulkan masalah mental dan sosial bagi penderitanya. Dinas sosial selaku pihak yang menaungi penyandang disabilitas mempunyai program yang terkait dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya sehingga tidak terjatuh dalam keadaan kondisi lemah dan terpinggirkan.

Selain itu program yang dibuat Dinas Sosial adalah memberikan kegiatan pelatihan berupa pelatihan keterampilan kuliner, seperti membuat ayam dan tahu goreng krispi serta pelatihan kerajinan tangan, seperti keterampilan mote-mote. Program tersebut dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di setiap desa. Program selanjutnya yaitu Gebyar Kreatifitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan satu tahun sekali. Program yang ditujukan untuk mengekspresikan kreatifitas dari dalam diri penyandang disabilitas tersebut diikuti oleh penyandang disabilitas dengan kategori usia dari 4-18 tahun dan lebih dari 18 tahun ke atas.

Program tersebut berupa kegiatan penampilan karya seni mulai dari membaca puisi, tari yang semua pesertnya merupakan penyandang disabilitas. Ada pula kegiatan kerajinan yang ditampilkan dari penyandang disabilitas usia 18 tahun ke atas berupa kerajinan batik ciprat. Namun, program tersebut dinilai masih minim, terutama bagi penyandang disabilitas dalam usia produktif dikarenakan pada program yang diadakan untuk setiap satu tahun sekali ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, dan program ini juga tidak dapat menjadi sumber mata pencaharian utama bagi para kaum penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.⁵⁶

Manfaat dari program Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu antara lain:

⁵⁶Wawancara kepada Bapak Syarifuddin, Kamis, 11 Juli 2019 Jam 10.00 di Dinas Sosial Kota Binjai

1. Dinas Sosial selaku menaungi masalah sosial yg khususnya penyandang disabilitas sangat membantu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya bimbingan dan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah melalui tenaga ahli.
2. Perhatian dari Dinas Sosial yang cukup besar bagi penyandang disabilitas dengan diterimanya di sekolah-sekolah yang khusus untuk mereka dan hampir disamakan dengan siswa lainnya,
3. Lapangan pekerjaan semakin lebar bagi penyandang disabilitas bagi yang mempunyai keahlian/skill.

Program pemerintah ini sudah berjalan 4 tahun dengan banyak membantu penyandang disabilitas karena Dinas Sosial membantu rakyatnya seluas-luasnya melalui berbagai macam program pemberdayaan serta keterampilan yang sudah tertera. Dampak dari program Dinas Sosial dalam pemberdayaan ini semakin banyak yang terbantu meskipun penyandang disabilitas setiap tahunnya terus bertambah tetapi dengan adanya program dari Dinas Sosial masyarakat disabilitas sangat terbantu dan bisa akan disejajarkan dengan manusia normal lainnya. Bila dilihat kemakmurannya masih jauh dari manusia normal lainnya karena penyandang disabilitas perlu penyesuaian dalam keahliannya dengan manusia normal lainnya. Untuk itu perlu tenaga ahli yang turut membimbing agar bisa makmur kehidupannya seperti manusia normal lainnya.

C. Bentuk Pemberdayaan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Binjai

Bentuk pemberdayaan Dinas Sosial untuk mensejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang disabilitas sedikit banyak telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Baik itu melalui peminjaman modal, pembinaan, pendidikan inklusi, pengembangan karakter, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Terkait dengan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, yang dimaksud memfasilitasi adalah bentuk memberdayakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Harapan adanya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap penyandang disabilitas ini hendaknya dapat terus dilakukan, agar kemandirian dan kesejahteraan dalam kehidupannya dapat terwujud kehidupan bermasyarakat dengan melalui partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut dalam kehidupan social melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang ada sehingga tercipta kemandirian.

Tentu saja kegiatan pemberdayaan dilakukan demi terwujudnya taraf hidup yang lebih baik. Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk merubah kehidupannya, dari yang belum mampu menjadi mampu, belum berdaya menjadi

berdaya dan lain-lain. Semua hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat yang diberdayakan turut berpartisipasi aktif untuk melakukan perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Pemberdayaan dilandasi oleh keadilan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan baik itu kemampuan fungsional, vokasional, pendidikan dan kemampuan sosialnya, rasa percaya diri serta kemandirian.⁵⁷

Jumlah Disabilitas

Tabel 1.1

NO	Kecamatan	Tahun 2016	Tahun 2018
1	Binjai Utara	75	76
2	Binjai Barat	75	84
3	Binjai Timur	71	82
4	Binjai Selatan	46	47
	Jumlah	267	289

Sumber: Pra Riset Juni 2019

⁵⁷Wawancara kepada Bapak Gunawan, Jum'at, 12 Juli 2019 Jam: 19.00, di Rumah Bapak Gunawan

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi data dari Dinas Sosial pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya. Hal ini sudah seharusnya perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah yang dalam hal ini melalui Dinas Sosial selaku instansi yang memang menaungi masalah penyandang disabilitas, serta masyarakat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalisir salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya dengan cara memberdayakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki pembinaan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Upaya kegiatan pemberdayaan yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai selaku instansi yang memang menaungi masalah penyandang disabilitas berupa kegiatan pelatihan keterampilan.

Tabel 1.2

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Kota Binjai

NO	Jenis Pelatihan	Minggu Pelatihan	Jumlah Peserta	Jenis Bantuan
1	Pelatihan keterampilan kuliner (ayam dan tahu	2 minggu sekali	10 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Gerobak dagang • Kompor gas

	goreng krispi)			<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan masak/peralatan menggoreng
2	Pelatihan keterampilan mote-mote	2 minggu sekali	10 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan membuat mote-mote

Sumber: Pra Riset juli 2019, Dinas Sosial Kota Binjai di Bidang Sosial

Terkait dengan data diatas, kegiatan pelatihan yang diberikan seyogyanya tidak hanya diberikan setiap 2 minggu sekali, dan bentuk pelatihan yang diberikan juga harus diperluas tidak hanya dengan pelatihan keterampilan namun dapat berupa kegiatan pemberdayaan yang memberikan peluang akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pada setiap 2 minggu sekali jumlah peserta hanya terdiri 10 orang. Apabila di bandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Binjai, jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan tersebut sangat minim, jumlah tersebut bahkan tidak mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yakni 289 orang.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya bantuan

sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Binjai. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota Binjai terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

D. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai.

Yang termasuk factor penghambat yaitu:

1. Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat

Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, karena komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan karena rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.

2. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda

Dalam banyak kasus, pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lainnya,

3. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri

Sering sebuah program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa factor teknis, factor ekonomi, factor perilaku pelaksan ataupun masyarakat.

4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksana program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudara Ari Permana selaku salah satu penyandang disabilitas pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 jam 15.10.

Adapun hambatan-hambatan lainnya bagi penyandang disabilitas adalah:

1. Keterbatasan gerak dan langkah karena faktor fisik
2. Keterbatasan kemampuan karena tidak dapat leluasa bergerak dan berkarir
3. Kurangnya tenaga ahli yang selalu mendampingi dan membimbing bagi penyandang disabilitas.
4. Kurangnya lapangan pekerjaan karena masih terbatasnya kemampuan dan keahlian bagi penyandang disabilitas.⁵⁸

BAB V

⁵⁸Hasil wawancara dengan saudara Ari Permana selaku salah satu penyandang disabilitas, pada hari Sabtu, 13 Juli 2019 jam 15.10

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah melaksanakan perannya namun belum maksimal karena melihat dari segi jumlah penerima bantuan dari perannya yaitu peran fasilitatif yang dilaksanakan Dinas Sosial belum secara merata, dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan masih terbilang minim bahkan tidak mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Binjai yakni sebanyak 381 orang.

Selain itu Dinas Sosial telah menjalankan perannya dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Binjai yaitu dengan memfasilitasi para penyandang disabilitas seperti memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan kursi roda kepada penderita tuna daksa. Selain itu dari segi peningkatan pengetahuan keterampilan peran Dinas Sosial yakni dengan melakukan pelatihan seperti salon untuk 10 penyandang disabilitas, dan pijat untuk 10 penyandang tuna netra dengan mendatangkan ahli sebagai narasumber sekaligus instruktur bagi mereka.

Sehingga peran-peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas dari segi jumlah penerima bantuan sosial dapat dikatakan meningkat walaupun tidak dengan jumlah yang signifikan. Sedangkan dari segi pelatihan, peran yang dilakukan Dinas cukup baik walaupun tidak mengalami

peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah peserta pelatihan yang hanya 10 orang selama 10-15 hari per-tahun dengan jenis pelatihan yang berbeda tiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Dinas Sosial sebaiknya mendata penyandang disabilitas dengan merata. Selain itu Dinas Sosial harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan. Teknis Dinas Sosial sudah cukup baik, namun kurang meratanya pendataan penyandang disabilitas menjadi nilai minus bagian Dinas Sosial disegala peran. Untuk itu, peneliti menyarankan agar

Dinas Sosial melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas, agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Darman, "Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Provinsi Kepulauan Riau", *Skripsi* (Kepulauan Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015).

Biro Hukum Depsos RI, Undang-undang RI NO.4 Tahun 1997

Brown, S. "Methodological Paradigms that Shape Disability Research" dalam Alberch,dkk.

Bungin, Burhan. 2007 *Penelitian Kualitatif*, Cet I; Jakarta: Kencana.<http://carapedia.com/pengertiandefenisiperaninfo2184.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 20.57 WIB

Daming, Saharuddin. "Pelembagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat" makalah Semiloka, (tidak diterbitkan, 2009)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka

Dokumen Salamnca di Spanyol tahun 1994 diselenggarakan di Unesco

Fahir. *Teori Peran dan Defenisi Peran Menurut Para Ahli*,<http://fahri-blus.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-defenisi-peran-menurut.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 21.17

Fahir. *Teori Peran dan Defenisi Peran Menurut Para Ahli*,<http://fahri-blus.blogspot.com/2013/06/teori-peran-dan-defenisi-peran-menurut.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 21.17
Handbook of Disability Studies, (London:Sage), dalam Ro'fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif*, (Yogyakarta:PLSD UIN Sunan Kalijaga, 2010)

<http://carapedia.com/pengertiandefenisiperaninfo2184.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 20.57 WIB

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 20-10-2018, pukul 23.00 wib http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Masyarakat, diakses tanggal 19-10-2018/pukul 20.00 wib

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 20-10-2018, pukul 23.00 wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_Masyarakat, diakses tanggal 19-10-2018/pukul 20.00 wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51408/Chapter%2011.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Diakses pada 27 Februari 2019, pukul 09:34 Wib

<https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10601/dinas-sosial.html>, diakses tanggal 19-10-2018/pukul 22.30

Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2001 *Metode Penelitian Sosial*, Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Imam Suprayogo, 2003 *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008 *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Kemensekneg RI, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107, Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)* Pasal1

Mikkelsen, Brita, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

Moloeng, dkk. 2002 *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.

Ar-Rifa'i, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan ke-2*, (Jakarta:Gema Insani, 2007)

Muslim, Aziz. 2009 *Metodologi Pengembang Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit TERAS.

Muslim, Aziz. 2012 *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru.

Poerwadaminta, 1990 *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:1990)

- Pratiwi, Gusti Indah. "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekanbaru". *Jurnal* (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, 2016).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Rukminto Adi, Isbandi. 2002 *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: LP FEUI.
- S. Nasution. 2008 *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara.
Soeharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan*
- Soekanto, Soejono. 1997 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Sugiono. 2006 *Metode Penelitian Administrasi* Cet, XIV; Jakarta: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006 *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka cipta.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, 2005 Bandung: PT. Revika Aditama.
- Suprayogo, Imam 2003 *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- T. Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Jakarta:Refika Aditama,2006),hlm:65-66
- s
Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Wikipedia Kamus Ensiklopedia*", diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/anak_berkebutuhan_khusus_tanggal_06_Februari_2019.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:2013)Mikkelsen, Brita, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- Zubaedi. 2013 *Pengembangan Masyarakat Wacana &Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013

LAMPIRAN



KANTOR DINAS SOSIAL KOTA BINJAI



Visi dan Misi

Visi

1. Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera.

Misi

1. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengembangkan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PKMS
3. Meningkatkan dan melestarikan nilai - nilai kepelawanan, keperintisan dan kesetia kawan sosial untuk menjadi keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi Masyarakat untuk memenuhi Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi PKMS.

Tujuan

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan menjamin kesejahteraan sosial bagi PKMS.
2. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan.
3. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PKMS
4. Meningkatkan dan melestarikan nilai - nilai kepelawanan, keperintisan, dan kesetia kawan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran

1. Meningkatkan kemudahan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, pemberdayaan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PKMS.
2. Para penyelenggara program pelayanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan bekerja secara lebih optimal.
3. Bertambahnya program - program perlindungan dan jaminan sosial bagi PKMS.
4. Masyarakat pelaku sejarah, pejuang, tokoh masyarakat, etnis, agama dan tokoh pendidikan bersama secara melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.



Wawancara Bersama Staf Dinas Sosial Kota Binjai





Wawancara Bersama Bapak Gunawan



Pelatihan Membuatik oleh Penyandang disabilitas



Membatik oleh Sari (penyandang disabilitas)